

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial digital telah menghadirkan berbagai layanan pembayaran elektronik, salah satunya adalah *Spaylater*. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan sistem pembayaran tertunda. Kemudahan yang ditawarkan oleh *Spaylater* menjadikan layanan ini diminati oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, salah satunya Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura. Namun demikian, penggunaan layanan ini tidak terlepas dari berbagai konsekuensi, salah satunya adalah penerapan sanksi keterlambatan pembayaran apabila pengguna tidak memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan, praktik ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait larangan riba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penerapan sanksi keterlambatan pada layanan *Spaylater* dengan fokus pada mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura pengguna *Spaylater*, serta studi dokumentasi dari literatur hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan ketentuan penggunaan *Spaylater*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kelompok mahasiswa yang mengalami keterlambatan pembayaran, yaitu karena kelalaian dengan itikad baik dan karena keterbatasan ekonomi. Sistem *Spaylater* mengenakan sanksi 5% secara otomatis tanpa mempertimbangkan alasan keterlambatan, serta biaya penanganan 2,95% pada cicilan di atas satu bulan, sehingga kewajiban pembayaran melebihi pokok utang, terutama pada tenor panjang. Ditinjau dari hukum Islam, mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip *ta'zīr* karena sanksi diberlakukan tanpa mempertimbangkan unsur kemampuan dan tujuan pembinaan, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17 bahwa sanksi hanya dikenakan kepada pihak yang mampu dan tidak boleh bersifat komersial. Selain itu, karena mekanismenya mendekati akad *qardh*, adanya tambahan biaya dan denda bertentangan dengan prinsip *qardh* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19 yang melarang penambahan atas pinjaman kecuali biaya administrasi nyata.

Kata Kunci: *Spaylater, Sanksi Keterlambatan, Analisis Hukum Islam*

ABSTRACT

The development of digital financial technology has given rise to various electronic payment services, one of which is Spaylater. This service allows users to make purchases with a delayed payment system. The convenience offered by Spaylater makes it popular with various groups, including students, including students of the Islamic Studies Faculty at Trunodjoyo University, Madura. However, the use of this service is not without various consequences, one of which is the imposition of late payment sanctions if users fail to meet the specified deadline. This practice raises questions from an Islamic legal perspective, particularly regarding the prohibition of usury.

This study aims to analyze Islamic law regarding the application of late payment sanctions to the Spaylater service, focusing on students of the Islamic Studies Faculty at Trunodjoyo University, Madura. The study used a qualitative field research method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through in-depth interviews with students from the Islamic Studies Faculty of Trunodjoyo University, Madura, who use Spaylater, as well as a documentary study of Islamic legal literature, Fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and Spaylater's terms of use

The study revealed two groups of students experiencing late payments: one due to negligence in good faith and the other due to financial constraints. The Spaylater system automatically imposes a 5% penalty without considering the reason for the delay, as well as a 2.95% handling fee on installments over one month, resulting in payment obligations exceeding the principal, especially for long-term tenors. From an Islamic legal perspective, this mechanism violates the principle of ta'zir because the sanctions are imposed without considering the elements of ability and the purpose of development, as emphasized in DSN-MUI Fatwa Number 17, which stipulates that sanctions should only be imposed on capable parties and should not be commercial in nature. In addition, because the mechanism is close to the qardh contract, the additional costs and fines are contrary to the qardh principle in DSN-MUI Fatwa Number 19 which prohibits additions to loans except for real administrative costs.

Keywords: *Spaylater, Late Fees, Islamic Legal Analysis*